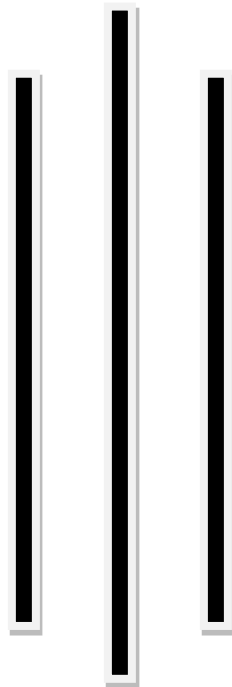


**LAPORAN
KINERJA
(LKj)
TAHUN ANGGARAN 2023**



BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematisasi LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2.3. Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi
Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
2. Mendorong Biro Hukum Setda Provinsi Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Hukum Setda Provinsi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Biro Hukum Setda Provinsi Jambi didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

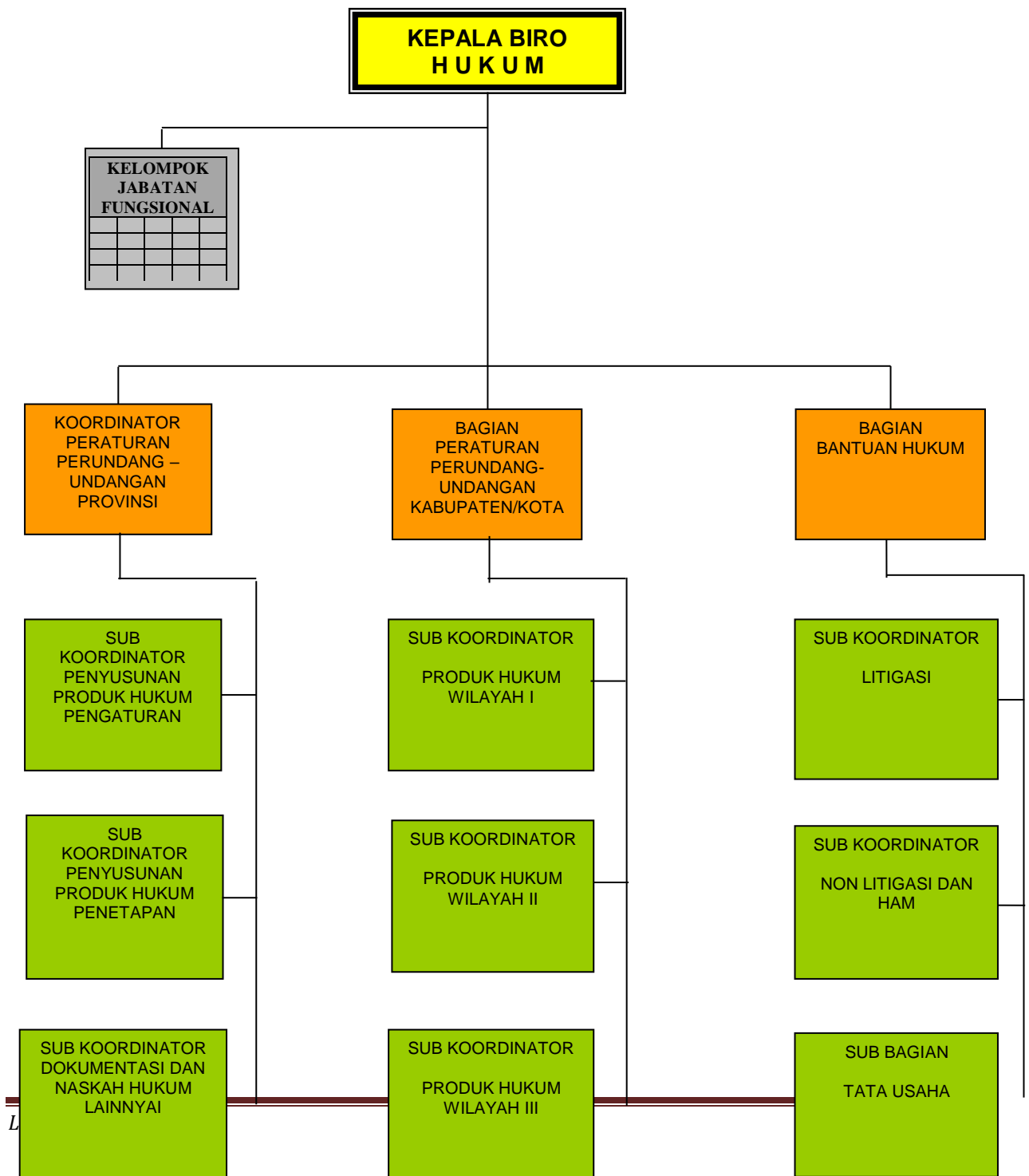
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Bagian Perundang-undangan Provinsi terdiri dari :
 - Sub Bagian Produk Hukum Pengaturan.
 - Sub Bagian Produk Hukum Penetapan.
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah hokum lainnya.
- b. Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - Sub Bagian Sengketa Hukum.
 - Sub Bagian Bantuan Hukum.
 - Sub Bagian Penegakan Hak Azasi Manusia dan Penyuluhan Hukum.
- c. Bagian Bantuan Hukum terdiri dari :
 - Sub Bagian Litigasi.
 - Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.
 - Sub Bagian Tata Usaha..

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Biro Hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi



1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi.

“Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kab/kota dan bantuan hukum.
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kab/kota dan bantuan hukum.
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kab/kota dan bantuan hukum.;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat daerah Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman SKPD pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum.
3. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait/teknis dalam upaya pembinaan HAM serta mengupayakan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas.
4. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan produk hukum daerah guna diklarifikasi.
5. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM sebagai pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

1.4. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan

perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai yang terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 11 (sebelas) Fungsional Tertentu dan 15 (lima belas) orang staf fungsional umum.

Pada Tabel berikut disajikan kondisi Sumber Daya Aparatur pada Biro Hukum Tahun 2023 berdasarkan Eselonisasi dan Golongan.

Tabel 1.1						
Komposisi Pegawai pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi						
NO	JENIS JABATAN	GOLONGAN PEGAWAI				JUMLAH (orang)
		IV	III	II	I	
1	ESELON II	1	-	-	-	1
2	ESELON III	2	-	-	-	2
3	ESELON IV	-	1	-	-	1
4	FUNGSIONAL TERTENTU	1	10	-	-	11
5	FUNGSIONAL UMUM	1	13	1	-	13
	JUMLAH	5	24	1	-	30

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan computer, alat komunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana Biro Hukum Setda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Secara lebih rinci sarana dan prasarana yang ada di Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Daftar Sarana dan Prasarana Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun

NO	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi
1	Alat-alat angkutan		Baik
2	Alat kantor dan rumah tangga		Baik
3	Alat studio dan alat komunikasi		Baik
4	Bangunan gedung		Baik
5	Jaringan		Baik
6	Buku Perpustakaan		Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki, secara rutin perlu dilakukan pemeliharaan, perbaikan dan pergantian sarana dan prasarana yang tidak dapat berfungsi secara optimal.

1.6. Keuangan

Dukungan dana dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum Provinsi Jambi pada tahun 2023 berasal dari APBD Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2023 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.955.998.640,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan 2 Program, 5 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu-isu Strategis, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana dan Sistematika Penulisan Lkj.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan masalah

LAMPIRAN

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang tertuang dalam RPJMD. Renstra Biro Hukum sendiri dituangkan dalam renstra Sekretaris Daerah untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra Biro Hukum Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Kinerja adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Program Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang telah diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam prioritas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi Jambi, Sekretariat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan good governance. Dalam lima tahun ke depan, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya

yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi harus mampu mengantisipasi perubahan multidimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Visi Misi Gubernur Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya.

Visi Pembangunan Provinsi Jambi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**.

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintahan Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintahan dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan local dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religious dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka terwujudnya visi pembangunan tersebut, Misi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ada 3 (tiga) misi yakni :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.

2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian

pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, social budaya dan kesetaraan gender.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Bertolak dari Visi dan Misi Gubernur Jambi, maka untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Provinsi Otonom yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri dengan tetap menjalin kesatuan arah dan tujuan Pemerintah Pusat.
2. Mewujudkan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat.
3. Terlaksananya penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah Provinsi Jambi serta meningkatnya kualitas, profesionalitas aparatur di bagian bantuan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian hukum dilingkungan pemerintahan daerah.
4. Terlaksananya pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum.

Sasaran

Untuk mencapai hasil secara nyata Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik untuk kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu,

maka sasaran-sasaran yang ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah :

1. Terwujudnya produk hukum provinsi jambi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terevaluasi/terfasilitasinya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah secara terpadu dan terorganisasi dengan kemampuan aparatur yang berprofesional dan berkualitas.
4. Terdokumentasinya dan tersebarnya produk hukum secara cepat, akurat dan tepat sasaran melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Hukum beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1										
Sasaran Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026										
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	Target Tahunan						Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang dan kebutuhan masyarakat	Persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	100% (3496 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	16,6% (600 Produk Hukum Provinsi)	100% (7096 Produk Hukum Provinsi)
		Persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi	100% (520 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	16,6% (100 Produk Hukum Kab/Kota)	100% (600 Produk Hukum Kab/Kota)
		Persentase informasi produk hukum yang bisa diakses publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2023 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi membuat Perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2			
Perjanjian Kinerja Tahun 2022.			
Sasaran	Indikator Kinerja		Target
(2)	(3)		(4)
Meningkatnya penataan produk hukum daerah dan budaya taat hukum	1. Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi		100%
	2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi		100%
	3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik		100%
	4. Persentase penyelesaian permasalahan hukum Provinsi Jambi yang difasilitasi		90%
	5. Prediket SAKIP yang dicapai		B
	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 605.802.040,-	
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Rp. 1.350.196.600,-	

2.3 Rencana Program/Kegiatan dan Anggaran

Adapun Program Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang telah diprioritaskan sebagai berikut :

1. **Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum**

Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitas penyelesaian Masalah Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan

Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan

Sub Kegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

Sub Kegiatan: Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan DPA SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dari dana APBD.

Pada Bab ini akan diuraikan hasil capaian indikator utama, evaluasi dan analisis kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, serta pertanggungjawaban dari aspek keuangan yang mempengaruhi capaian kinerja serta permasalahan terkait beserta strategi pemecahan masalah.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Indikator yang menjadi ukuran pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan	1. Persentase Produk Hukum Provinsi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
		2. Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
		3. Persentase penyelesaian permasalahan Hukum Provinsi Jambi yang difasilitasi
		4. Persentase produk hukum provinsi yang dapat diakses publik

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada periode Tahun 2023-2026, secara rinci diuraikan pada table berikut :

**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Jambi	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	1. Persentase Produk Hukum Provinsi yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	100% (3496 Produk Hukum Provinsi)	20% (660 Produk Hukum Provinsi)	20% (660 Produk Hukum Provinsi)	20% (660 Produk Hukum Provinsi)	20% (660 Produk Hukum Provinsi)	20% (660 Produk Hukum Provinsi)	100% (7096 Produk Hukum Provinsi)
			2. Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	100% (450 Produk Hukum Kab/Kota)	20% (90 Produk Hukum kab/Kota)	20% (90 Produk Hukum kab/Kota)	20% (90 Produk Hukum kab/Kota)	20% (90 Produk Hukum kab/Kota)	20% (90 Produk Hukum kab/Kota)	100% (7096 Produk Hukum Provinsi)
			3. Persentase penyelesaian permasalahan hukum Provinsi Jambi yang difasilitasi	90% (50 kasus/perkara)	16 %	16 %	16 %	16 %	16 %	80 %
			4. Persentase Produk Hukum Provinsi yang dapat diakses publik	100%	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100 %

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Penyusunan dan pengembangan system pengumpulan data Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi didapatkan dari data kinerja yang akurat dari bagian-bagian pada Biro Hukum sendiri, lengkap dan konsisten mengenai pencapaian kinerja organisasi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomian dan efektivitas.

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Kinerja Utama (Eselon II)
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat , dan penyelenggaraan pemerintah daerah.	1. Persentase produk hukum provinsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%
		2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%
		3. Persentase Produk Hukum Provinsi yang dapat diakses publik	100%	90%

		4. Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi	80%	100%
		5. Nilai SAKIP	B	BB

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 1 dibawah ini:

Tabel 3. 4
Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
≥ 100 %	Sangat Baik
90-100 %	Baik
70 % - 89,99 %	Cukup Baik
50 % - 69,99 %	Kurang Baik
≤ 49,99 %	Tidak Baik

3.2.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing – masing indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

3.2.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.5
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 x 100%)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.	1. Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%
		2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%
		3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	100%	90%	90%
		4. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	80%	100%	100%
		5. Nilai SAKIP	B	BB	100%

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

Sasaran : MENINGKATNYA HARMONISASI DAN SINKRONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam pengukuran sasaran strategis Meningkatkan Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah digunakan indicator kinerja yaitu : persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan persentase produk hukum daerah yang dapat diakses public serta persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi dengan rincian masing-masing indicator sebagai berikut :

- 1. Indikator Kinerja** : persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
 - Pengukuran persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi tahun 2023. Perbandingan target dan realisasi dilakukan terhadap persentase produk hukum provinsi yang telah difasilitasi dengan persentase produk hukum provinsi yang diajukan untuk difasilitasi pada tahun 2023.

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas
Produk Hukum Provinsi Yang Difasilitasi

NO.	PRODUK HUKUM PROVINSI	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Perda	100%	100%	100%
2	Pergub	100%	100%	100%
3	Keputusan Gubernur	100%	100%	100%
	Jumlah Persentase			100%

Berdasarkan table diatas, jumlah produk hukum Provinsi Jambi yang difasilitasi/dievaluasi secara keseluruhan mencapai target kinerja sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

2. Indikator Kinerja : persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pengukuran indikator kinerja persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan membandingkan realisasi produk hukum kabupaten/kota yang telah difasilitasi/evaluasi dengan target produk hukum kabupaten/kota yang telah dievaluasi/fasilitasi pada tahun 2023.

Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang difasilitasi

NO.	PRODUK HUKUM DAERAH KAB/KOTA	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	2	3	4	5

1	KOTA JAMBI	9,09%	8,88%	100 %
2	MUARO JAMBI	9,09%	8,88%	100 %
3	BATANGHARI	9,09%	8,88%	100 %
4	TANJUNG JABUNG BARAT	9,09%	10%	100 %
5	TANJUNG JABUNG TIMUR	9,09%	8,88%	100 %
6	BUNGO	9,09%	8,88%	100 %
7	TEBO	9,09%	8,88%	100 %
8	SAROLANGUN	9,09%	8,88%	100 %
9	SUNGAI PENUH	9,09%	8,88%	100 %
10	KERINCI	9,09%	8,88%	100 %
11	MERANGIN	9,09%	10%	100 %
	Jumlah Produk hukum	100%	100%	100 %
	Jumlah Persentase			100 %

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa dari jumlah produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi/fasilitasi pada tahun 2023 mencapai target, sehingga capaian kinerja dapat dinilai sebesar 100%.

3. Indikator Kinerja : persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik

- Pengukuran persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik dilakukan dengan cara membandingkan antara produk hukum yang diupload dalam sistem JDIH dengan produk hukum provinsi yang ditetapkan pada Tahun 2023.

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Produk Hukum Provinsi yang dapat diakses publik

NO.	PRODUK HUKUM PROVINSI	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAAN KINERJA TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Perda	90%	90%	100%

2	Pergub	90%	90%	100%
	Jumlah Persentase			100%

Berdasarkan table diatas, jumlah produk hukum Provinsi Jambi yang diupload pada Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) sesuai dengan target kinerja dikarenakan tidak semua produk hukum dapat ditetapkan pada tahun berjalan, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

4. Indikator Kinerja : persentase permasalahan hukum yang difasilitasi

- Pengukuran persentase permasalahan hukum yang difasilitasi dilakukan dengan cara membandingkan antara penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi dengan permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah pada Tahun 2023.

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Permasalahan hukum yang difasilitasi

NO.	Permasalahan hukum	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Permasalahan hukum	80%	80%	100%
2	Permasalahan hukum non litigasi	80%	80%	100%

Berdasarkan	Jumlah Permasalahan hukum	80	80%	100%
	Jumlah Persentase			100 %

an table diatas, jumlah permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintah seluruhnya difasilitasi, dengan persentase keseluruhan 100%.

5. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran tingkat capaian kinerja atas Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 dilakukan dengan penyebaran Kuestioner pada masing-masing bagian dengan menilai setiap triwulan. Nilai capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan realisasi nilai IKM dengan Target Nilai IKM tahun 2023.

Tabel 3.10 Realisasi dan Nilai SAKIP Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Skor IKM	B	BB	100%

Dapat dijelaskan disini bahwa untuk realisasi nilai SAKIP tahun 2023 sesuai dengan target kinerja, sehingga realisasi capaian kinerja atas indicator SAKIP adalah 100% .

3.2.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian

Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.	1. Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	100%	100%	94,44%	100%
		4. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		5. Nilai IKM	80	100%	93,75%	100%

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tahun 2023 **sama** dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 2) Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah **sama..**
- 3) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses public tahun 2023 lebih **tinggi** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- 4) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi tahun 2023 saja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 5) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja IKM tahun 2023 dan skor IKM tahun 2021 bila di bandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan (**lebih tinggi**).

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

Sasaran : MENINGKATNYA HARMONISASI DAN SINKRONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

1. Indikator Kinerja : persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Capailah kinerja atas Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada tahun 2022, dihitung dengan formula membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12: Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja
Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Tahun 2022

Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
2	3	4	5
Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih	100%	100%	100%

tinggi			
--------	--	--	--

Capaian Kinerja atas Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tahun 2021, dihitung dengan formula membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%.

Tabel 3.13: Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja
Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Tahun 2021

Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
2	3	4	5
Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%

2. Indikator Kinerja : persentase produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Capailah kinerja atas Persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi sehingga sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada tahun 2021 dan 2020, dihitung dengan formula membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Capailah kinerja atas persentase produk hukum daerah kabupaten/kota yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tahun 2020 dihitung dengan formula membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15

Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi
Tahun 2021

Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
2	3	4	5
Persentase produk hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%

3. Indikator Kinerja : persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik

Capailah kinerja atas Persentase produk hukum yang dapat diakses public tahun 2022 dan 2021, dihitung dengan formula membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja

dikalikan 100%. Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Produk Hukum Provinsi yang didapat diakses publik
Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
2	3	4	5
Persentase produk hukum yang dapat diakses publik			
Perda	80%	80%	100%
Pergub	80%	90%	100%
Jumlah Persentase			100%

Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Produk Hukum Provinsi yang didapat diakses publik

Tahun
2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
2	3	4	5
Persentase produk hukum yang dapat diakses public			
Perda	90%	80%	88,88%
Pergub	90%	90%	100%
Jumlah Persentase			94%

4. Indikator Kinerja : persentase permasalahan hukum yang difasilitasi

Capailah Kinerja atas Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi tahun 2022 dan 2021, dihitung dengan formula membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Permasalahan hukum yang difasilitasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
2	3	4	5
Persentase Permasalahan hukum yang difasilitasi	80%	80%	100%
Jumlah Persentase			100%

Adapun capaian kinerja atas persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Permasalahan hukum yang difasilitasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
2	3	4	5
Persentase Permasalahan hukum yang difasilitasi	70%	70%	100%
Jumlah Persentase			100%

3.2.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.20

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Target Kinerja 2022(sesuai dengan yang ada pada dok Renstra)	Capaian Kinerja atas Target Renstra Tahun 2022	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	1. Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%	Tercapai
		2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%	Tercapai

3.2.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif

solusi yang telah dilakukan.

Sasaran : MENINGKATNYA HARMONISASI DAN SINKRONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Indikator Kinerja : persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Realisasi atas Indikator Kinerja persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **telah mencapai** target yang diperjanjikan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi selama tahun 2023 terhadap peningkatan persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemrakarsa produk hukum provinsi
- 2) Meningkatkan koordinasi tingkat pusat terkait evaluasi dan fasilitasi produk hukum provinsi.

2. Indikator Kinerja : persentase produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertetangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Realisasi atas Indikator Kinerja persentase produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **telah mencapai** target yang diperjanjikan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi selama tahun 2023 terhadap peningkatan

persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Bimbingan teknis penyusunan produk hukum dengan peserta dari Bagian Hukum pemerintah kabupaten/kota.
2. Melaksanakan Rapat koordinasi dengan Bagian Hukum kabupaten/kota terkait permasalahan dalam rangka penyusunan produk hukum kabupaten/kota.
3. Memantapkan pelaksanaan monitoring ke kabupaten/kota terhadap pelaksanaan produk hukum hasil evaluasi/fasilitasi.
4. Meningkatkan koordinasi tingkat pusat terkait evaluasi dan fasilitasi produk hukum kabupaten/kota.

3.2.3 Analisis atas efisien penggunaan sumber daya pendukung kinerja.

Tabel 3.21

Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya pendukung kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2021	Serapan Anggaran(%)	Ket
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi	1. Persentase produk hukum	100%	1.912.541.177,-	Efisiensi

rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.	provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi		(97,78%)	
	2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%		
	3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	100%		
	4. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	100%		
	5. Nilai SAKIP	100%		

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa atas sasaran strategis Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh

lebih besar dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.

3.2.4 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.22

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket	Program	Kegiatan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	Tercapai	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
	2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	Tercapai	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
	3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	90%	100%	Tercapai	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
	4. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	80%	100%	Tercapai	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
	5. Nilai IKM	80	80	Tercapai	Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran : MENINGKATNYA HARMONISASI DAN SINKRONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

1. Indikator Kinerja : persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Realisasi atas Indikator Kinerja persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan pelaksanaan Program/Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan **telah mencapai** target yang diperjanjikan.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan telah menunjang keberhasilan pernyataan kinerja yaitu Indikator Kinerja persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Indikator Kinerja : persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Realisasi atas Indikator Kinerja persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan pelaksanaan Program/Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan dengan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum kabupaten/kota **telah mencapai** target yang diperjanjikan.

Hal ini menunjukkan bahwa program/Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan dengan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum kabupaten/kota telah menunjang keberhasilan pernyataan kinerja dengan Indikator Kinerja persentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Indikator Kinerja : persentase produk hukum daerah yang dapat diakses public.

Realisasi atas Indikator Kinerja persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik dengan pelaksanaan Program/Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perundang-undangan dengan sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya telah **mencapai** target yang diperjanjikan.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya sudah menunjang keberhasilan pernyataan kinerja terhadap indikator Kinerja persentase produk hukum daerah yang dapat diakses publik.

Secara Keseluruhan Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Hukum menunjukkan ketercapaian kinerja antara target dan realisasi, yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pernyataan kinerja.

3.3 Perencanaan Strategis

Dalam rangka penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran, Biro Hukum menggunakan sumber dana APBD yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program/Kegiatan. Pagu anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.955.988.640,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.912.541.177,- atau 97,78 %

sebagaimana tercatat pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) terlampir.

Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2023 Biro Hukum melaksanakan 2 Program dan 5 kegiatan dan 13 Sub kegiatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing-masing kegiatan cukup baik, rata-rata tingkat capaian masing-masing indikator di atas 90%.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2023 berjalan dengan baik. Seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan pencapaian sasaran kinerja rata-rata di atas 90%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 3.23
Realisasi Keuangan Tahun 2023

No.	Program/ SubKegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d Desember			Sisa Anggaran (Rp)
			Penyerapan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	Program Administrasi Umum	605.802.040,00	233.571.270,00	96,97	99,13	2.643.840,00
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.500.000,00	23.558.000,00	88,90	100	2.942.000,00
1	Penyusunan dokumen perencanaan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	7.000.000,00	6.500.000,00	92,86	100,00	500.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	7.000.000,00	6.400.000,00	91,43	100,00	600.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000,00	4.658.000,00	71,66	100,00	1.842.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	569.052.040,00	542.520.470,00	95,34	100	26.531.570,00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.444.700,00	86.399.470,00	96,59	100	3.045.230,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.607.340,00	456.121.000,00	95,10	100	23.486.340,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.250.000,00	6.950.000,00	67,80	100	3.300.000,00
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.250.000,00	6.950.000,00	67,80	100	3.300.000,00
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.350.196.600,00	1.381.868.900,00	90,95	99,42	137.371.850,00
	Fasilitasi Penyusunan perundang-undangan	595.896.600,00	587.623.449,00	98,61	100	8.273.151,00
7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	176.871.000,00	175.519.879,00	99,23	100	1.351.121,00

8	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	61.875.000,00	60.851.215,00	98,34	100,00	1.023.785,00
9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	174.624.500,00	169.124.500,00	96,85	100,00	5.500.000,00
10	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	182.526.100,00	182.127.855,00	99,78,00	100,00	398.245,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	754.300.000,00	751.889.258,00	99,68	100	2.410.742,00
11	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	643.710.000,00	642.349.853,00	99,79	100	1.360.147,00
12	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	110.590.000,00	109.539.405,00	99,05	100	1.050.595,00
JUMLAH TOTAL BELANJA		1.955.988.640,00	1.912.541.177,00	97,78	100	43.457.463,00

BAB IV PENUTUP

Secara umum dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) sub kegiatan, telah terlaksana dengan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan. Keberhasilan ini dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi sumber daya aparatur serta fasilitas yang tersedia pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi serta berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Meskipun secara umum kinerja Biro Hukum telah berhasil dalam melaksanakan semua program dan sasaran yang telah ditetapkan bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terdapat adanya permasalahan, namun permasalahan dan hambatan dimaksud dapat diatasi dengan upaya dan strategi yang tepat untuk tercapainya tingkat keberhasilan yang optimal.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ini tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan terutama dalam menganalisis kinerja organisasi, oleh karena itu masukan-masukan positif guna penyempurnaan dan pengembangan sistem Akuntabilitas Publik dilingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi masih sangat diperlukan, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum diharapkan akan lebih baik dan sempurna pada tahun-tahun yang akan datang.